

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Bagian ini menjelaskan perkembangan inflasi Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional selama **Triwulan II Tahun 2026**. Pada bulan **April 2026**, inflasi Sulawesi Tengah masih berada pada level yang terkendali. Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditas pangan strategis, seperti bawang merah, tomat, ikan segar, dan beras. Meskipun demikian, penurunan harga beberapa komoditas hortikultura dan pangan lainnya mampu menahan laju inflasi sehingga tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional.

Secara bulanan, Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sulawesi Tengah pada April 2026 mencatatkan inflasi sebesar 0,51% (mtm). Meningkat dibandingkan bulan sebelumnya 0,38% (mtm). Realisasi inflasi bulanan tersebut menyebabkan secara tahunan inflasi Sulawesi Tengah tercatat sebesar 2,21% (yoy), melandai dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,83% (yoy) serta lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,42% (yoy).

Inflasi tahunan Sulawesi Tengah pada bulan April 2026 tetap berada dalam rentang target inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Kondisi ini utamanya didorong oleh meredanya tekanan inflasi pada komponen administered prices (AP) yang turun signifikan menjadi sebesar 1,32% (yoy), dibandingkan bulan sebelumnya 3,86% (yoy). Penurunan tekanan tersebut juga didukung oleh inflasi inti yang relatif stabil sebesar 2,26% (yoy), sedikit melandai dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 2,28% (yoy), serta komponen volatile food turut mengalami penurunan inflasi menjadi 2,89% (yoy), dari sebelumnya 3,78% (yoy). Hal ini mencerminkan efektivitas upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID Provinsi Sulawesi Tengah.

Secara bulanan, inflasi terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,26% (mtm). Komoditas utama penyumbang inflasi bulanan antara lain tomat (0,24%), cabai rawit (0,11%), angkutan udara (0,07%), bawang merah (0,05%), dan bahan bakar rumah tangga (0,04%). Di sisi lain, tekanan inflasi lebih

lanjut tertahan oleh deflasi pada komoditas perikanan, antara lain ikan lajang (-0,06%), ikan cakalang (-0,06%), ikan selar (-0,05%), seiring dengan tercukupinya pasokan di pasar.

Memasuki **Mei 2026**, perkembangan inflasi dipengaruhi oleh normalisasi permintaan masyarakat pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri. Tekanan inflasi dari kelompok **volatile food** cenderung mereda seiring membaiknya pasokan sejumlah komoditas pangan, meskipun fluktuasi harga masih terjadi pada beberapa komoditas yang dipengaruhi faktor musim, kondisi cuaca, dan distribusi. Di sisi lain, kelompok inti (core inflation) relatif stabil, mencerminkan permintaan domestik yang tetap terjaga.

Selanjutnya, pada **Juni 2026**, inflasi Sulawesi **Tengah tetap terkendali** dengan adanya penguatan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui pelaksanaan strategi **4K**, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Berbagai upaya seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, pemantauan harga secara berkala, penguatan kerja sama antardaerah, serta pengawasan distribusi komoditas strategis turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Secara keseluruhan, perkembangan inflasi selama Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa stabilitas harga di Provinsi Sulawesi Tengah tetap terjaga dan berada dalam sasaran inflasi nasional, meskipun masih terdapat tantangan berupa tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, kondisi

cuaca, serta biaya distribusi yang memengaruhi harga beberapa komoditas pangan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Perkembangan harga komoditas April - Juni 2026

Selama periode April - Juni 2026, terdapat berbagai komoditas pangan yang mengalami kenaikan dan penurunan harga. Komoditas yang mengalami tren kenaikan harga yaitu Beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, kedelai, bawang merah, bawang putih. Di sisi lain, komoditas pangan yang mengalami fluktuasi harga yaitu cabai merah keriting dan cabai merah besar.

Selama Triwulan II Tahun 2026 (April-Juni), inflasi Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tren meningkat, dari 2,21% (yoy) pada April, menjadi 2,77% (yoy) pada Mei, dan mencapai 3,83% (yoy) pada Juni, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 3,34% (yoy) pada Juni 2026. Kenaikan ini menunjukkan adanya tekanan harga yang perlu diantisipasi oleh TPID melalui penguatan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).

Beberapa permasalahan yang diidentifikasi antara lain:

1. Peningkatan harga komoditas pangan strategis

- Terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditas utama seperti beras, gula pasir, minyak goreng, cabai, bawang merah, dan beberapa komoditas hortikultura akibat meningkatnya biaya distribusi dan pasokan yang belum sepenuhnya stabil.
- Permintaan masyarakat meningkat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), sementara penambahan pasokan belum mampu sepenuhnya mengimbangi peningkatan konsumsi.

1. Ketergantungan pasokan dari luar daerah

- Sulawesi Tengah masih bergantung pada pasokan sejumlah komoditas pangan dari provinsi lain sehingga rentan terhadap gangguan produksi maupun distribusi di daerah pemasok.
- Fluktuasi harga di wilayah produsen secara langsung memengaruhi harga di pasar Sulawesi Tengah.

1. Hambatan kelancaran distribusi

- Kondisi geografis Sulawesi Tengah yang luas serta masih terbatasnya konektivitas

antardaerah menyebabkan biaya logistik relatif tinggi.

- Gangguan cuaca pada jalur laut dan darat menghambat distribusi komoditas ke beberapa wilayah, khususnya daerah kepulauan dan wilayah terpencil.

1. Produksi pertanian yang belum merata

- Sebagian wilayah mulai memasuki masa tanam sehingga pasokan beberapa komoditas hortikultura menurun.
- Risiko perubahan iklim, curah hujan yang tidak menentu, serta potensi kekeringan mulai memengaruhi produktivitas pertanian dan ketersediaan pangan.

1. Volatilitas harga pangan bergejolak (Volatile Food)

- Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi.
- Harga komoditas seperti cabai, bawang merah, tomat, dan beras masih berfluktuasi karena dipengaruhi faktor musim dan distribusi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berbagai upaya pengendalian inflasi daerah terus dilaksanakan oleh TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kerangka strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) yaitu:

K1- KETERJANGKAUAN HARGA

1. Melanjutkan pelaksanaan sidak pasar rutin bersama TPID untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan pangan strategis.
2. Mendorong optimalisasi penyaluran beras SPHP (BULOG) melalui pasar tradisional, Rumah Pangan Kita (RPK), dan WARKOP TPID di Kota Palu, Luwuk, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Melaksanakan Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka perayaan HUT Sulawesi Tengah ke-62 (Sulteng Nambaso) melalui kolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sigi dan Kios Pangan Ranggulako.
4. Kegiatan Pasar Murah Operasi Pasar Murah di Tolitoli Disambut Antusias Warga Jelang Idul Adha 1447 H.
5. Gerakan Pangan Murah sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah. Sabtu, (18/4/2026).

K2 - KETERSEDIAAN PASOKAN

1. Mendorong skema pasokan langsung dari kelompok tani binaan BI ke kegiatan pasar murah, khususnya untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti cabai rawit dari Poso dan Toili untuk wilayah Kota Palu dan Luwuk.
2. Melakukan survei identifikasi penyaluran sarana Good Agricultural Practices (GAP) serta melakukan penjajakan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara wilayah produsen dengan kabupaten/kota IHK untuk memperkuat konektivitas pasokan.
3. Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional Inpres Manonda Kota Palu, Sabtu (13/06/2026).

K3 - KELANCARAN DISTRIBUSI

Memberikan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) untuk komoditas pangan strategis,

1. berkolaborasi dengan TPID Kota Palu, Luwuk, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Tolitoli.
2. Melanjutkan pengembangan Modular Cooling Systems (CoolLar) hingga tahap uji lapangan serta penyusunan desain produk bekerja sama dengan ITS Surabaya sebagai upaya penguatan infrastruktur rantai dingin.
3. Pengawasan distribusi MINYAKITA di Pasar Inpres Manonda, Kota Palu.
4. **Pengawasan Barang Impor Bersama Polda Sulteng.**

K4 - KOMUNIKASI EFEKTIF

1. Mengoptimalkan peran TPID melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM), Rapat Koordinasi Daerah, dan Capacity Building (CB) untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi.
 2. Mengimplementasikan fitur "Palu Pangan" pada Aplikasi Sangu Palu sebagai sarana informasi harga, publikasi pasar murah, dan kanal pengaduan masyarakat.
 3. Melakukan pengendalian ekspektasi inflasi melalui kampanye belanja bijak bekerja sama dengan kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait.
 4. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tanggal 20 April 2026 di Ruang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
 5. **Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Swisbelhotel tanggal 27 April 2026.**
 6. **Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tanggal 28 April 2026.**
 7. **Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tanggal 29 April 2026 di Ruang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.**
 8. **Rapat Koordinasi Daerah TPID tanggal 5 Mei 2026 di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov. Sulteng.**
 9. **High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah tanggal 5 Mei 2026 bertempat di ruang Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah.**
 10. **Rapat Koordinasi Daerah TPID tanggal 7 Mei 2026 di Sriti dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah.**
 11. **High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah di ruang Polibu tanggal 11 Mei 2026 dipimpin ibu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.**
 12. **High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah tanggal 21 Mei 2026 bertempat di ruang Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.**
 13. **Focus Group Discussion (FGD) Edukasi Upaya Ekspor bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa (Kopdes) di Aula Subi Disperindag Prov. Sulteng. Palu, 20 Mei 2026 – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulteng.**
 14. **Surat Edaran Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Antisipasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Fenomena Iklim El Nino dan Musim Kemarau Tahun 2026**
 15. **Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah**
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Selama Triwulan II Tahun 2026 (April-Juni), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi

Sulawesi Tengah terus melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Berbagai langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat di tengah meningkatnya permintaan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul adha dan mulai munculnya risiko gangguan pasokan akibat kondisi cuaca. Beberapa evaluasi kebijakan

- Kebijakan berjalan cukup efektif, namun belum mampu sepenuhnya menahan kenaikan harga komoditas yang dipengaruhi oleh faktor produksi dan distribusi.
- Pasokan pangan secara umum masih mencukupi kebutuhan masyarakat, meskipun beberapa komoditas hortikultura mengalami keterbatasan akibat penurunan produksi musiman.
- Distribusi relatif lancar, namun biaya logistik yang tinggi masih menjadi salah satu faktor penyebab kenaikan harga di beberapa daerah.
- Komunikasi antarinstansi semakin baik dan mampu memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, meskipun perlu peningkatan kualitas data stok dan distribusi secara real time.

Secara keseluruhan, kebijakan pengendalian inflasi Provinsi Sulawesi Tengah pada Triwulan II Tahun 2026 **berjalan cukup efektif** dalam menjaga inflasi tetap relatif terkendali dan masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional ($2,5 \pm 1\%$), meskipun pada Juni 2026 inflasi mencapai **3,83% (yoy)** atau berada pada batas atas kisaran sasaran. Peningkatan inflasi tersebut menunjukkan bahwa TPID perlu memperkuat langkah antisipatif, terutama dalam menjaga pasokan pangan strategis, memperlancar distribusi antarwilayah, meningkatkan kerja sama antardaerah, memperluas Gerakan Pangan Murah, serta memperkuat sistem peringatan dini terhadap risiko cuaca dan gangguan pasokan agar stabilitas harga tetap terjaga pada triwulan berikutnya.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah kabupaten/kota perlu mengantisipasi berbagai potensi tekanan inflasi ke depan, terutama yang berasal dari kenaikan harga LPG, BBM non-subsidi, dan tiket pesawat. Selain itu, pemanfaatan data BMKG perlu dioptimalkan sebagai dasar dalam pengamanan stok pangan serta mitigasi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan distribusi komoditas pangan strategis. TPID bersama Satgas Pangan juga diharapkan rutin melakukan sidak pasar untuk mencegah penimbunan, mengantisipasi permainan harga, dan memastikan ketersediaan barang di pasar tetap terjaga.

Upaya pengendalian inflasi daerah juga perlu terus diperkuat melalui implementasi strategi 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Di samping itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan disiplin pelaporan TPID serta pengisian data harga harian secara berkala sebagai dasar pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat. Penguatan Early Warning System (EWS) juga menjadi penting untuk mendeteksi potensi tekanan inflasi sejak dini sehingga langkah antisipatif dapat dilakukan secara lebih responsif dan terkoordinasi.